



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Upaya Pemprov DKI Dorong Pertumbuhan Ekonomi

◆ Sinergi dengan Pemerintah Pusat

JAKARTA (Poskota) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. Berbagai langkah ditempuh agar ketahanan pangan terjaga, inflasi terkendali, dan kemiskinan tertangani.

Dalam menjalankan komitmen ini, Pj Gubernur Heru bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia pun memimpin Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam menjaga stabilitas harga, dan langsung memonitor kondisi di berbagai pasar untuk mengecek harga, ketersediaan, serta produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.

"Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat terus memastikan implementasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) berjalan lancar dan makin dimasifkan. Di bulan Ramadan dan Idulfitri ini, kami juga terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar ketersediaan bahan pangan terjamin dengan kualitas yang baik, serta harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta," ujar Pj Heru Budi di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/3).

Sinergi itu pun diwujudkan dengan kelancaran penyediaan dan



Poskota/Aldi

Pj Heru berukomitmen jaga stabilitas ekonomi di Ibu Kota.

pendistribusian pasokan bahan pangan melalui kerja sama antardaerah secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 36 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi. Di antaranya, cabai dan bawang merah yang dipasok dari Jawa Tengah (Magelang dan Temanggung) dan Jawa Barat (Garut dan Sumedang). Kerja sama dalam sektor pangan ini juga tidak lepas dari peran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya yang turut memonitor harga pangan lokal serta distribusi pasokan sehingga berjalan dengan baik.

"Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Pusat dalam pengendalian

inflasi sektor pangan di DKI Jakarta. Selain memberikan pengaruh terhadap inflasi Jakarta, juga memberikan pengaruh terhadap inflasi nasional, karena nilai inflasi Jakarta mempengaruhi 25-27% inflasi nasional," ungkap Pj Gubernur Heru.

Pj Gubernur Heru juga memastikan subsidi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus berjalan. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 366 lokasi distribusi.

Penerima manfaat program pangan subsidi ini adalah pemegang Kartu Jakarta Pin-

tar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS, penghuni rumah susun (rusun), serta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, telah dilakukan upaya peningkatan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan. Untuk meningkatkan kewirausahaan, dalam periode 17 Oktober 2022 sampai dengan 24 Maret 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Ke-

cil dan Menengah DKI Jakarta telah menerima 18.183 peserta baru yang mendaftar Jakarta Entrepreneur, menggelar pelatihan Jakarta Entrepreneur kepada 5.017 peserta, 3.792 perizinan telah diberikan kepada peserta Jakarta Entrepreneur, serta memasarkan 376 produk binaan Jakarta Entrepreneur ke berbagai pameran baik nasional maupun internasional.

Sementara itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 55 kelas (reguler dan mobile training unit), pelatihan keterampilan kerja di 7 Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, serta bursa kerja di 5 wilayah kota. Hasilnya, sebanyak 77,03% (5.871 dari 7.626 orang) peserta pelatihan diterima di pasar kerja.

"Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran," tutup Pj Gubernur Heru. (Aldi/lnf)